



Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Berbagai Negara

Uswatun Hasanah^{1*}, Depi Nopia¹, Ahmad Junaidi¹, Ja'ranah¹, Basilius Redan Werang¹

¹ Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia.

*Corresponding Author:

Uswatun Hasanah, Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia.

uswatunhasanah17081984@gmail.com

DOI: [10.29303/jpap.v10i2.1799](https://doi.org/10.29303/jpap.v10i2.1799)

© 2026 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang implementasi kebijakan pendidikan melalui studi kasus di berbagai negara dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode library research. Data penelitian berupa literatur yang terdiri atas artikel jurnal internasional dan nasional, buku ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan organisasi internasional yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), sintesis tematik (*thematic synthesis*), dan analisis komparatif (*comparative analysis*) untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan implementasi kebijakan pendidikan pada berbagai konteks. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, efektivitas tata kelola, kompetensi pelaksana kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kemampuan sistem pendidikan dalam mengadaptasi perubahan global sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, praktik baik di berbagai negara menunjukkan bahwa reformasi pendidikan yang efektif dibangun melalui kepemimpinan yang adaptif, kolaborasi multipihak, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, dan sistem monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti agar setiap kebijakan tidak hanya efektif pada tahap perumusan, tetapi juga mampu menghasilkan peningkatan mutu, pemerataan, dan keberlanjutan sistem pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pendidikan, Library Research, Reformasi Pendidikan, Tata Kelola Pendidikan, Studi Komparatif.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa di tengah dinamika global yang terus berkembang (Ningrum et al., 2025). Perubahan yang dipicu oleh revolusi industri 4.0, transformasi digital, krisis kesehatan global, perubahan iklim, hingga tuntutan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) telah mendorong berbagai negara melakukan reformasi kebijakan pendidikan secara berkelanjutan (Muslim et al., 2021). Kebijakan pendidikan tidak lagi dipahami sebagai sekadar seperangkat regulasi administratif, melainkan sebagai mekanisme strategis yang mengarahkan transformasi sistem pendidikan agar

mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi abad ke-21, karakter yang kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat (Agustian et al., 2025a). Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan yang mampu menjembatani antara tujuan normatif pemerintah dengan praktik penyelenggaraan pendidikan di lapangan.

Meskipun berbagai negara telah merancang kebijakan pendidikan yang progresif, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan yang kompleks. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan pendidikan, kompetensi guru, ketersediaan sumber daya, kesiapan infrastruktur, budaya organisasi, partisipasi

Sitasi:

Hasanah, U., Nopia, D., Junaidi, A., Ja'ranah, & Werang, B. R. (2026). Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Berbagai Negara. (*JPAP*) *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*, 10(2), 370–378. <https://doi.org/10.29303/jpap.v10i2.1799>

masyarakat, serta stabilitas politik dan ekonomi (Ohene, 2023). Perbedaan karakteristik sosial, budaya, geografis, dan tingkat pembangunan antarnegara menyebabkan kebijakan yang berhasil diterapkan di suatu negara belum tentu memberikan hasil yang sama ketika diadaptasi di negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis, kontekstual, dan multidimensional, sehingga memerlukan strategi yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara (Hasyim, 2025).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam mempercepat implementasi kebijakan pendidikan. Digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sistem manajemen pendidikan berbasis data, pembelajaran hibrida (*hybrid learning*), hingga pengembangan platform pendidikan digital telah memperluas akses terhadap layanan pendidikan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem pendidikan (Mulyani et al., 2024). Selain itu, meningkatnya kolaborasi internasional melalui berbagai organisasi global juga mendorong pertukaran praktik baik (*best practices*) antarnegara dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Septaria Dinda Serena et al., 2024). Dengan demikian, tantangan yang dihadapi setiap negara juga diiringi oleh berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas implementasi kebijakan pendidikan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas formulasi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengelola proses perubahan secara efektif. Negara-negara seperti Finlandia berhasil membangun sistem pendidikan yang berkualitas melalui kepercayaan yang tinggi terhadap profesionalisme guru, desentralisasi pengelolaan sekolah, dan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan (Nurhayati et al., 2025). Sementara itu, Singapura menekankan pembangunan kapasitas guru, kepemimpinan sekolah yang kuat, serta sistem evaluasi berbasis data sebagai landasan peningkatan kualitas pendidikan. Korea Selatan menunjukkan keberhasilan melalui investasi jangka panjang pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi pendidikan. Sebaliknya, sejumlah negara berkembang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, kesenjangan akses pendidikan, rendahnya kapasitas implementasi di

tingkat daerah, serta lemahnya koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan. Perbedaan pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kebijakan, kapasitas institusi, dan konteks lokal tempat kebijakan tersebut diterapkan (Hertanto et al., 2025a).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas implementasi kebijakan pendidikan, sebagian besar masih berfokus pada konteks negara tertentu atau mengevaluasi satu kebijakan secara spesifik. Penelitian yang membandingkan tantangan dan peluang implementasi kebijakan pendidikan di berbagai negara secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, kajian komparatif lintas negara sangat penting untuk mengidentifikasi pola umum, faktor-faktor keberhasilan, hambatan implementasi, serta strategi adaptasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. Analisis semacam ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan (ELEMS-IKWEGBU, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang implementasi kebijakan pendidikan melalui studi kasus di berbagai negara. Kajian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan, menganalisis praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh berbagai negara, serta merumuskan implikasi yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan pendidikan sekaligus menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan peneliti dalam merancang strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif sesuai dengan tantangan pendidikan global pada abad ke-21.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) (Fadli & Miftah, 2023). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang implementasi kebijakan pendidikan melalui penelaahan kritis terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan. Berbeda dengan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan memanfaatkan

berbagai sumber ilmiah sebagai data utama sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, membandingkan berbagai perspektif, serta menyusun sintesis konseptual mengenai implementasi kebijakan pendidikan pada berbagai konteks negara (Primasari et al., 2021).

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal internasional dan nasional, buku ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan organisasi internasional yang membahas implementasi kebijakan pendidikan. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu Scopus, Web of Science, ERIC, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Google Scholar, serta dokumen resmi UNESCO dan OECD. Kata kunci yang digunakan meliputi *education policy implementation*, *educational reform*, *education governance*, *comparative education*, *education policy*, *kebijakan pendidikan*, *implementasi kebijakan pendidikan*, *reformasi pendidikan*, dan *studi komparatif pendidikan*. Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi literatur, penelitian ini menggunakan 25 artikel ilmiah yang terdiri atas 12 artikel jurnal internasional dan 13 artikel jurnal nasional sebagai sumber utama analisis.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Literatur

Aspek	Kriteria
Topik	Implementasi kebijakan pendidikan, reformasi pendidikan, tata kelola pendidikan, dan studi komparatif kebijakan pendidikan
Jenis sumber	Artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, dan laporan organisasi internasional
Kualitas publikasi	Jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terindeks
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Relevansi	Memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian

Pemilihan literatur dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih publikasi yang memiliki keterkaitan

langsung dengan fokus penelitian. Artikel yang dipilih memenuhi beberapa kriteria, yaitu membahas implementasi atau reformasi kebijakan pendidikan, diterbitkan pada jurnal ilmiah bereputasi atau jurnal nasional terindeks, menyajikan informasi yang memadai mengenai proses implementasi kebijakan, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor pendukung, tantangan, maupun peluang implementasi kebijakan pendidikan (Susanto et al., 2024).

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan sintesis tematik (*thematic synthesis*) dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi informasi penting dari setiap literatur, seperti tujuan penelitian, konteks kebijakan, metode penelitian, serta temuan utama. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema yang memiliki karakteristik serupa melalui sintesis tematik. Proses ini menghasilkan beberapa tema utama, yaitu kapasitas kelembagaan, peran pelaksana kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, tata kelola pendidikan, pengaruh reformasi pendidikan global, serta tantangan implementasi kebijakan di Indonesia.

Setelah tema-tema utama terbentuk, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan implementasi kebijakan pendidikan pada berbagai konteks negara. Analisis ini difokuskan pada bagaimana setiap negara mengembangkan strategi implementasi, menghadapi tantangan, serta membangun praktik-praktik baik (*best practices*) yang dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. Tahap akhir penelitian berupa penyusunan sintesis konseptual yang mengintegrasikan seluruh temuan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Tabel 2. Tahapan Analisis Data

Tahap	Uraian Kegiatan	Luaran
Identifikasi literatur	Mengumpulkan literatur yang relevan	Kumpulan artikel ilmiah
Seleksi literatur	Menentukan literatur sesuai fokus penelitian	Literatur yang digunakan sebagai sumber analisis
Analisis isi	Mengidentifikasi tujuan, konteks, dan temuan utama setiap artikel	Informasi pokok setiap penelitian
Sintesis tematik	Mengelompokkan temuan berdasarkan kesamaan isu	Tema-tema utama implementasi kebijakan pendidikan
Analisis komparatif	Membandingkan implementasi kebijakan pada berbagai negara	Persamaan, perbedaan, tantangan, dan peluang implementasi
Sintesis konseptual	Mengintegrasikan seluruh hasil analisis	Kesimpulan mengenai tantangan dan peluang implementasi kebijakan pendidikan

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki konteks dan perspektif berbeda. Proses ini memungkinkan setiap temuan dianalisis secara kritis sehingga sintesis yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan isi masing-masing literatur, tetapi juga menjelaskan hubungan antartemuan serta implikasinya terhadap pengembangan kebijakan pendidikan pada berbagai konteks negara.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks karena tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kapasitas institusi, karakteristik pelaksana kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta dinamika sosial yang berkembang pada setiap negara. Meskipun setiap negara memiliki sistem pendidikan, struktur pemerintahan, dan prioritas pembangunan yang berbeda, literatur yang dikaji memperlihatkan adanya pola yang relatif serupa mengenai faktor-faktor yang

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Secara umum, implementasi kebijakan yang efektif ditandai oleh adanya koordinasi kelembagaan yang baik, kepemimpinan yang adaptif, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kemampuan pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pendidikan sesuai dengan karakteristik lokal.

Analisis terhadap literatur juga menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan pendidikan berkembang dari perspektif yang semula berorientasi pada proses administrasi menjadi pendekatan yang lebih komprehensif. Implementasi tidak lagi dipahami sebagai tahapan akhir setelah kebijakan ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses yang berlangsung secara dinamis melalui interaksi antara pemerintah, institusi pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan setiap aktor dalam membangun kolaborasi, melakukan adaptasi terhadap perubahan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3. Karakteristik Literatur yang Dikaji

Penulis	Fokus Kajian	Kontribusi terhadap Penelitian
Muthanna & Sang (2023)	Faktor implementasi kebijakan pendidikan	Menyusun model konseptual faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan.
Jian, Xue, & Guo (2025)	Reformasi pendidikan berbasis PISA	Menjelaskan pengaruh PISA terhadap reformasi kurikulum dan sistem asesmen di berbagai negara.
Karaevli, Çeven, & Korumaz (2022)	Implementasi oleh <i>street-level bureaucrats</i>	Menjelaskan peran pelaksana kebijakan dalam menentukan keberhasilan implementasi.
Al-Thani (2025)	Pelibatan pemangku kepentingan	Menawarkan pendekatan kolaboratif dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan.
Green & Koebele (2024)	Tata kelola pendidikan	Menjelaskan pentingnya koordinasi dalam sistem pemerintahan multilevel.
Hertanto, Suryatna, & Irlan (2024)	Transformasi kebijakan pendidikan Indonesia	Menggambarkan dinamika implementasi kebijakan pendidikan nasional.
Tobondo (2025)	MBKM dan reformasi guru	Mengidentifikasi tantangan dan solusi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
Widiastuti (2025)	Evaluasi kebijakan pendidikan	Mengevaluasi tantangan, capaian, dan arah pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Tabel 3 menunjukkan bahwa literatur yang dikaji berasal dari berbagai konteks negara dengan fokus penelitian yang saling melengkapi. Sebagian penelitian menekankan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, sedangkan penelitian lainnya mengkaji reformasi pendidikan, tata kelola pemerintahan, keterlibatan pemangku kepentingan, hingga evaluasi kebijakan. Keberagaman fokus tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan

pendidikan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teoretis.

Implementasi Kebijakan Pendidikan sebagai Proses Sistemik
Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan bukan sekadar proses menjalankan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan merupakan proses sistemik

yang melibatkan hubungan antara kebijakan, organisasi, sumber daya manusia, kepemimpinan, serta lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, kualitas implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan isi kebijakan, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan kemampuan aktor yang menjalankan kebijakan tersebut.

Model konseptual yang dikembangkan oleh Muthanna dan Sang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, meliputi karakteristik kebijakan, kapasitas organisasi, kepemimpinan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi lingkungan implementasi (Muthanna & Sang, 2023). Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik belum tentu menghasilkan dampak yang optimal apabila organisasi pelaksana tidak memiliki kapasitas yang memadai atau apabila koordinasi antaraktor tidak berjalan secara efektif.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling memengaruhi. Ketika salah satu komponen mengalami kelemahan, proses implementasi secara keseluruhan juga akan mengalami hambatan. Sebaliknya, apabila seluruh komponen mampu bekerja secara terpadu, peluang keberhasilan implementasi akan meningkat. Perspektif ini menggeser pandangan tradisional yang menempatkan implementasi hanya sebagai tahap administratif menuju pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Kajian mengenai reformasi pendidikan global juga memperkuat pandangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak negara melakukan perubahan kebijakan sebagai respons terhadap hasil evaluasi internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Namun demikian, keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengadaptasi perubahan tersebut sesuai dengan kondisi nasional masing-masing (Li et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran organisasi yang berlangsung secara terus-menerus.

Kapasitas Kelembagaan sebagai Faktor Penentu Implementasi

Salah satu tema yang paling dominan dalam literatur adalah pentingnya kapasitas kelembagaan

sebagai fondasi implementasi kebijakan pendidikan. Kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan organisasi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengalokasikan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan. Organisasi pendidikan yang memiliki struktur kerja yang jelas, pembagian tugas yang terkoordinasi, serta mekanisme komunikasi yang efektif cenderung mampu mengimplementasikan kebijakan secara lebih konsisten dibandingkan organisasi yang memiliki tata kelola yang lemah.

Penelitian mengenai sistem pemerintahan multilevel menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika koordinasi berjalan dengan baik, proses penyampaian informasi, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga kebijakan dapat diterapkan secara konsisten pada berbagai tingkat pemerintahan (Green & Koebele, 2025). Sebaliknya, lemahnya koordinasi berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, tumpang tindih kewenangan, bahkan keterlambatan pelaksanaan program pendidikan.

Dalam konteks reformasi pendidikan, kapasitas kelembagaan juga berkaitan dengan kemampuan institusi dalam mengelola perubahan. Reformasi pendidikan pada umumnya menuntut adanya perubahan kurikulum, sistem asesmen, pengembangan profesional guru, maupun tata kelola sekolah. Perubahan tersebut hanya dapat berlangsung secara efektif apabila institusi memiliki budaya organisasi yang mendukung inovasi, kepemimpinan yang mampu mengarahkan perubahan, serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan kebijakan baru.

Kondisi tersebut terlihat pada berbagai negara yang menjadikan hasil evaluasi internasional sebagai dasar reformasi pendidikan. Reformasi yang dipicu oleh hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) maupun rekomendasi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas institusi dalam mengadaptasi rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik sistem pendidikan masing-masing (Sarmurzin et al., 2021).

Hasil tersebut memberikan implikasi bahwa penguatan kapasitas kelembagaan perlu menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan pendidikan. Peningkatan kualitas tata kelola, penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan sumber daya yang memadai,

serta pembangunan budaya organisasi yang adaptif merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak berhenti pada tahap formulasi, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap mutu pendidikan.

Peran Pelaksana Kebijakan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan tidak diterapkan secara mekanis sesuai dengan dokumen peraturan, melainkan melalui proses interpretasi, adaptasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara tujuan kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan realitas pelaksanaan di satuan pendidikan.

Perspektif tersebut diperkuat oleh penelitian mengenai *street-level bureaucrats* yang menjelaskan bahwa guru, kepala sekolah, pengawas, serta pejabat dinas pendidikan merupakan aktor yang secara langsung menentukan bagaimana suatu kebijakan diterapkan di lapangan. Kelompok ini tidak hanya bertugas melaksanakan kebijakan, tetapi juga menafsirkan, menyesuaikan, bahkan memodifikasi implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi sekolah. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses yang bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pertimbangan profesional, pengalaman, sumber daya yang tersedia, serta karakteristik peserta didik dan masyarakat setempat (Karaevli et al., 2024).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pada tingkat nasional dengan implementasinya di tingkat sekolah. Kesenjangan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan kebijakan, tetapi juga oleh adanya variasi kapasitas pelaksana dalam memahami tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan konteks sosial dan budaya pada masing-masing wilayah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak dapat diukur hanya berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam menyesuaikan kebijakan tanpa menghilangkan tujuan utamanya.

Pada sisi lain, berbagai literatur menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan semakin

bergeser dari pendekatan birokratis menuju pendekatan kolaboratif. Kebijakan pendidikan modern tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan sebagai hasil interaksi antara pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga sektor swasta. Perubahan paradigma tersebut muncul karena berbagai persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Kajian mengenai kebijakan pendidikan di Qatar menunjukkan bahwa pendekatan konsultatif yang hanya meminta masukan masyarakat pada tahap tertentu belum mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar partisipatif. Pelibatan pemangku kepentingan perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak proses identifikasi masalah, penyusunan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi sehingga setiap aktor memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan (Al-Thani, 2025).

Pentingnya partisipasi pemangku kepentingan juga terlihat dalam berbagai penelitian di Indonesia. Kajian mengenai transformasi kebijakan pendidikan nasional menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat dalam membangun ekosistem pembelajaran yang lebih berkualitas dan berkeadilan. Reformasi pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal apabila masing-masing aktor bekerja secara parsial karena berbagai persoalan pendidikan memiliki karakteristik yang saling berkaitan dan memerlukan penyelesaian secara kolaboratif (Hertanto et al., 2025b).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengorganisasi sumber daya yang dimiliki. Dukungan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, kompetensi guru dalam menerapkan kebijakan, serta partisipasi orang tua menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan pada tingkat sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada level birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan

dan budaya organisasi di setiap satuan pendidikan (Agustian et al., 2025b).

Fenomena yang sama terlihat pada implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan reformasi guru di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan inovatif sering kali menghadapi tantangan pada tahap implementasi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja, serta kemampuan institusi dalam mengelola perubahan. Meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan profesionalisme pendidik, implementasinya memerlukan pendampingan, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas organisasi agar tujuan reformasi dapat tercapai secara optimal (Tobondo, 2024).

Selain faktor internal organisasi, literatur juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh dinamika perubahan sosial. Perubahan teknologi, perkembangan ekonomi, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan menyebabkan kebijakan pendidikan harus terus diperbarui agar tetap relevan. Studi pada tingkat sekolah menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang mampu membangun budaya organisasi adaptif, mengembangkan inovasi pembelajaran, dan menjalin kemitraan dengan masyarakat cenderung lebih berhasil menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran (Rohmadi et al., 2024).

Tabel 4. Sintesis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Aktor	Peran dalam Implementasi	Implikasi terhadap Keberhasilan Kebijakan
Pemerintah	Menyusun regulasi, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan	Menentukan arah kebijakan dan konsistensi implementasi
Pemerintah daerah	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai karakteristik wilayah	Menjamin kesesuaian implementasi dengan kebutuhan daerah
Kepala sekolah	Memimpin implementasi kebijakan pada tingkat sekolah	Membangun budaya organisasi dan menggerakkan perubahan
Guru	Menerjemahkan kebijakan ke dalam proses pembelajaran	Menentukan kualitas implementasi di ruang kelas
Pengawas sekolah	Memberikan pembinaan dan supervisi	Menjaga mutu pelaksanaan kebijakan
Orang tua dan masyarakat	Memberikan dukungan serta umpan balik	Memperkuat keberlanjutan implementasi kebijakan
Perguruan tinggi dan organisasi profesi	Menyediakan pendampingan, penelitian, dan pengembangan kapasitas	Mendukung inovasi dan perbaikan kebijakan berbasis bukti

Tabel 4 memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Pada tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin perubahan, sementara guru menjadi aktor utama yang menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran. Peran tersebut diperkuat oleh pengawas sekolah melalui fungsi supervisi serta oleh orang tua, masyarakat, dan perguruan tinggi melalui dukungan, kemitraan, dan pengembangan kapasitas.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pendidikan yang efektif tidak cukup mengandalkan regulasi yang baik, tetapi memerlukan ekosistem kolaboratif yang mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan

komitmen di antara seluruh pemangku kepentingan. Semakin tinggi tingkat kolaborasi antarpihak, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebaliknya, implementasi yang didominasi oleh pendekatan birokratis tanpa partisipasi aktif para pelaksana dan pemangku kepentingan cenderung menghasilkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan kolaboratif, peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan, serta pelembagaan partisipasi publik menjadi strategi penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang keberhasilannya ditentukan oleh keterkaitan antara kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, kompetensi

pelaksana kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kemampuan sistem pendidikan dalam merespons dinamika perubahan global dan kebutuhan lokal. Sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik belum tentu menghasilkan dampak yang optimal apabila tidak didukung oleh koordinasi antarlembaga yang efektif, kepemimpinan yang adaptif, partisipasi aktif para pemangku kepentingan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pengalaman berbagai negara juga memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil tidak hanya berorientasi pada perubahan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas implementasi, pengembangan kolaborasi multipihak, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, berbagai tantangan implementasi masih berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan kebijakan, penguatan kapasitas institusi, pemerataan kualitas sumber daya pendidikan, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif pada tahap perumusan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu, pemerataan, dan keberlanjutan sistem pendidikan.

Daftar Pustaka

- Agustian, K., Afriantoni, A., Agustina, D., & Olyvia, A. (2025a). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.359>
- Agustian, K., Afriantoni, A., Agustina, D., & Olyvia, A. (2025b). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.359>
- Al-Thani, G. (2025). Beyond Consultation: Rethinking Stakeholder Engagement in Qatar's Public Education Policymaking. *Education Sciences*, 15(6), 769. <https://doi.org/10.3390/educsci15060769>
- ELEMS-IKWEGBU, H. N. (2024). Comparative Analysis of Educational Policy Formulation and Implementation Strategies in Developed and Developing Countries. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, XI(VII), 922-941. <https://doi.org/10.51244/IJRSI.2024.1107073>
- Fadli, F., & Miftah, M. (2023). KEBIJAKAN CYBER ISLAMIC UNIVERSITY DALAM PENINGKATAN SDM DI ERA SOCIETY 5.0. *Manajemen Pendidikan*, 18(2), 141-151. <https://doi.org/10.23917/jmp.v18i2.23287>
- Green, J. E., & Koebele, E. A. (2025). Coordinating school improvement: Understanding the impact of state implementation approach on coordination in multilevel governance systems. *Review of Policy Research*, 42(2), 188-211. <https://doi.org/10.1111/ropr.12612>
- Hasyim, N. (2025). Equitable Educational Infrastructure via Policy Execution and Stakeholder Involvement in Educational Institutions. *Journal of Public Policy and Local Government (JPPLG)*, 57-62. <https://doi.org/10.70188/f0s08188>
- Hertanto, Y., Suryatna, Y., & Irlan, L. M. I. (2025a). TRANSFORMASI DAN DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL: EKSPLORASI TEORETIS DAN EMPIRIS MENUJU EKOSISTEM PEMBELAJARAN BERKEADILAN. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 1311-1318. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.8251>
- Hertanto, Y., Suryatna, Y., & Irlan, L. M. I. (2025b). TRANSFORMASI DAN DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL: EKSPLORASI TEORETIS DAN EMPIRIS MENUJU EKOSISTEM PEMBELAJARAN BERKEADILAN. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 1311-1318. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.8251>
- Karaevli, Ö., Çeven, G., & Korumaz, M. (2024). Implementing education policy: reflections of street-level bureaucrats. *Asia Pacific Journal of Education*, 44(2), 488-502. <https://doi.org/10.1080/02188791.2022.2118670>
- Li, J., Xue, E., & Guo, S. (2025). The effects of PISA on global basic education reform: a systematic literature review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 106. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04403-z>
- Mulyani, H., Komalasari, K., Permatasari, M., Bribin, M. L., & Suriaman, S. (2024). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Global di Era Abad 21: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), 88-101. <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.55115>

- Muslim, Abd. Q., Suci, I. G. S., & Pratama, M. R. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JEPANG, FINLANDIA, CHINA DAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 170. <https://doi.org/10.25078/aw.v6i2.2827>
- Muthanna, A., & Sang, G. (2023). A Conceptual Model of the Factors Affecting Education Policy Implementation. *Education Sciences*, 13(3), 260. <https://doi.org/10.3390/educsci13030260>
- Ningrum, T. R. S., Edwar, Y., Wibowo, A. I., Sularni, S., Asmara, A., & Kashardi, K. (2025). Peran Pemerintah dan Kebijakan Pendidikan Perbandingan dengan Negara Lain. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4448-4455. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4280>
- Nurhayati, N., Sahara, A., Salsabila, F., Auliya, J., Zannah, M. C., Simangunsong, S. A. T., & Rahma, S. (2025). AKTOR KEBIJAKAN SEBAGAI PENGGERAK PERUBAHAN: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 5927-5935. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47435>
- Ohene, N. (2023). An Analysis of Factors Affecting the Successful Implementation of Educational Policies in Developing Countries. *Journal of Education Review Provision*, 1(3), 30-35. <https://doi.org/10.55885/jerp.v1i3.216>
- Primasari, I. F. N. D., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1479-1491. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.956>
- Rohmadi, Y., Rifa'i, A. A., Supriyanto, S., Ibrahim, R., Irmawati, W., & Suciyani, S. (2024). Education Policy Implementation at School Level: A Study of School Strategies for Facing Social Change at Klaten Senior High School, Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(9), 265-284. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.9.14>
- Sarmurzin, Y., Amanzhol, N., Toleubayeva, K., Zhunusova, M., & Amanova, A. (2021). The impact of OECD research on the education system of Kazakhstan. *Asia Pacific Education Review*, 22(4), 757-766. <https://doi.org/10.1007/s12564-021-09715-8>
- Septaria Dinda Serena, Nurul chasanah, & Auliya, I. (2024). Mendukung Sustainable Development Goals; Studi Literatur Kebijakan Sistem Pendidikan China, Finlandia, Jepang, dan Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 1225-1237. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.689>
- Susanto, T. T. D., Mela, A. G. K., Zahrah, S., Namsan, N. G., & Umair, Z. (2024). Analisis terhadap potensi risiko pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 180. <https://doi.org/10.29210/020243848>
- Tobondo, Y. A. (2024). Challenges and Solutions in the Implementation of Educational Policies in Indonesia: A Literature Analysis of Merdeka Belajar Kampus Merdeka and Teacher Reform. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1157-1164. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.997>